



KR-Antara/Sigid Kurniawan

**CULTURIDE QATAR-INDONESIA: Sejumlah pesepeda peserta Culturide Qatar-Indonesia 2023 melintasi Tugu Pal Putih di Yogyakarta, Rabu (7/6/2023). Kegiatan bersepeda dengan menempuh jarak 93 kilometer dimulai dari Benteng Vredenburg, Yogyakarta dan berakhir di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah tersebut diikuti pesepeda dari Qatar dan Indonesia yang merupakan rangkaian Qatar-Indonesia 2023 Year of Culture.**

## KPK KANTONGI CUKUP BUKTI

### Sekretaris MA Resmi Jadi Tersangka

**JAKARTA (KR)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan (HH) sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi cukup bukti.

"Dalam hal ini, tentu kami pastikan alat bukti telah KPK miliki perihal dugaan aliran uang dimaksud," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/6).

Diungkapkan Ali, tersangka HH diduga menerima uang dari mantan komisaris BUMN Dadan Tri Yudianto (DTY). Bahkan, dalam hal ini KPK menduga Hasbi menerima uang miliaran rupiah.

Sebelumnya Penyidik KPK pada Selasa (6/6) malam mengumumkan penetapan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Dua tersangka baru tersebut adalah Sekretaris MA Hasbi Hasan dan mantan Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto.

Terkait hal itu, KPK telah melakukan penahanan terhadap Dadan Tri Yudianto pada Selasa (6/6). Sedangkan terkait pena-

hanan terhadap Hasbi Hasan, Ghufron mengatakan, hal itu hanya tinggal menunggu waktu. "Itu bagian dari proses yang sedang KPK lakukan, jadi hanya soal waktu," kata anggota KPK Nurul Ghufron.

Terhadap kasus ini diungkapkan, HH diduga menerima aliran uang dari DTY untuk mengurus penanganan perkara di MA. Penyidik KPK menemukan bahwa DTY menerima uang Rp 11,2 miliar untuk mengurus perkara di MA. "Sebagian uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka DTY kepada HH," ungkapnya.

Meski tidak menyebut nominal yang diterima, menurut Ghufron, penyidik KPK memperkirakan jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Saat ini, tersangka DTY sudah ditahan untuk 20 hari terhitung sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan 25 Juni 2023 di Rutan KPK di Kavling C1.

Tersangka DTY dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Ful)-d

## JOKOWI JAMIN INVESTASI-KEBERLANJUTAN

# IKN Aman Siapa pun Presidennya

**SINGAPURA (KR)** - Presiden RI Joko Widodo menjamin investasi dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap aman terlepas dari siapa pun yang akan menjadi pemenang pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Jaminan itu disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara dalam forum Ecosperity Week 2023 di Marina Bay Sands, Singapura, Rabu (7/6), yang dihadiri kalangan investor, pejabat Pemerintah, dan akademisi.

Presiden Jokowi membuka pidatonya dengan berkelakar menanyakan kepada para hadirin mengenai siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. "Ah, maaf, salah naskah. Saya minta maaf atas kesalahan naskah ini kendati saya

tahu Anda sekalian cukup penasaran soal itu. Maaf," ujar Jokowi yang disambut gelak tawa hadirin sebagaimana disimak dalam tayangan pidato yang diunggah kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Presiden lantas mengatakan, dirinya yakin mitra Indonesia di Singapura paham siapa pun yang akan memimpin Indonesia ke depan akan fokus untuk menjadikan Indonesia sebagai raksasa dan kekuatan utama Asia. "Jadi, segala-

nya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Investasi Anda di Indonesia akan aman, begitu pula keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Jokowi.

Presiden kemudian menjabarkan berbagai konsep yang diusung IKN Nusantara, yakni sebuah kota pintar kelas dunia yang dikelilingi alam. IKN Nusantara juga dilabelinya sebagai kota hijau yang terdiri 65 persen hutan serta kota netral karbon pertama di Indonesia yang dilengkapi fasilitas pendidikan dan kesehatan kelas dunia.

Presiden Jokowi bahkan sempat menyinggung harga hunian yang melonjak tinggi di Singapura sembari berkelakar mungkin hadirin bisa mempertimbangkan Nusantara sebagai tempat tinggal di kemudian hari. "Nusantara akan menja-

di kota nyaman untuk dihuni dan berbisnis. Saya tahu harga permukiman di sini sudah melonjak tinggi, mungkin tinggal di Nusantara bisa menjadi opsi," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menghadiri Ecosperity Week 2023 untuk mempromosikan investasi Indonesia, terutama di bidang transisi energi, infrastruktur hijau, dan pembangunan IKN Nusantara. Selepas menghadiri Ecosperity Week, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong beserta Ibu Ho Ching di Istana Singapura.

Dari Singapura, Presiden melanjutkan kunjungan kerja ke Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah. (Ant/San)-f

## Gedung DPR RI IKN Dibangun 2024

**JAKARTA (KR)** - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibangun pada tahun 2024.

"Mudah-mudahan pada tahun 2024 siap mulai dibangun Gedung DPR di IKN," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6).

Basuki mengatakan, pihaknya telah menetapkan pemenang sayembara desain Gedung DPR RI di IKN. "Untuk Gedung DPR di IKN, kami sudah melakukan sayembara dan sudah terpilih yang terbaik dari sayembara tersebut," katanya.

Basuki menambahkan, saat ini Kementerian PUPR sedang menindaklanjuti detail desain untuk Gedung DPR RI tersebut. Sebelumnya, Kementerian PUPR menetapkan pemenang Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk Kompleks Istana Wakil Presiden, Kompleks Perkantoran Legislatif, Kompleks Perkantoran Yudikatif, serta Kompleks Peribadatan.

Kementerian PUPR akan mengkolaborasi karya pemenang sayembara perancangan kawasan dan bangunan gedung di IKN, termasuk perancangan Istana Wapres. Desain terpilih ini telah memenuhi kriteria konsep perancangan kawasan dan bangunan IKN. (Ant/San)-f

## KEPPRES KUOTA TAMBAHAN TERBIT

# Pelunasan Bipih Dibuka Selama 4 Hari

**JAKARTA (KR)** - Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk kuota tambahan segera dibuka. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Saiful Mujab mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi dasar dibukanya pelunasan kuota tambahan, Rabu (7/6) ditandatangani Presiden.

Regulasi itu adalah Keppres No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keppres No 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M yang bersumber dari Bipih dan Nilai Manfaat. "Alhamdulillah, Keppres sudah terbit. Pelunasan untuk kuota tambahan dibuka selama tiga hari, 8-12 Juni

2023," tegas Saiful Mujab di Jakarta, kemarin.

Indonesia tahun ini mendapat tambahan kuota dari Arab Saudi sebesar 8.000 jemaah.

Dengan demikian, total kuota haji tahun ini adalah 229.000 jemaah.

Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 467 tahun 2023 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan 1444 H/2023 M. Dalam KMA tersebut diatur, kuota tambahan terdiri 7.360 kuota haji reguler dan 640 kuota haji khusus. Untuk haji khusus, kuota tambahan ini terdiri 600 je-



maah dan 40 kuota petugas.

Kuota haji reguler tambahan, kata Saiful Mujab, dipertanggungjawabkan bagi jemaah haji reguler berdasarkan

urutan nomor

porsi berikutnya yang meliputi jemaah haji reguler yang saat pelunasan

tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem, jemaah haji cadangan

yang telah melakukan pelunasan dan jemaah haji reguler nomor urut porsi

berikutnya setelah jemaah haji cadangan

"Pada pelunasan ini, kita juga membuka kesempatan bagi jemaah dengan nomor

porsi urutan berikutnya lagi, untuk melunasi Bipih dengan status sebagai jemaah haji cadangan. Mereka akan mengisi jika kuota haji tambahan belum terpenuhi sampai penutupan pelunasan," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan alasan keterlambatan maskapai penerbangan haji saat hadir secara daring pada rapat tingkat menteri evaluasi pelaksanaan ibadah haji 1444 H. Selain itu, Menag Yaqut juga menyampaikan alasan keterlambatan dari maskapai penerbangan Saudia Airlines, yakni pesawat yang belum siap dan tidak sesuai kontrak. (Ati)-d

## PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR

# Panglima TNI Tetap Pilih Persuasif

**BADUNG (KR)** - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan tetap memilih cara persuasif dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrstens dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Alasannya untuk meminimalisasi ataupun mengantisipasi jatuhnya korban dari pihak masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Yudo Margono usai menggelar acara pertemuan petinggi militer Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam forum ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) ke-20 di Apurva Kempinski Nusa Dua Badung Bali, Rabu (7/6). "Untuk pilot sudah sering saya sampaikan bahwa kita tetap mengutamakan dialog, koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dan juga Pj (Penjabat) Bupati Nduga, kita utamakan dengan cara persuasif, tidak dengan operasi militer," ujarnya.

Yudo memastikan upaya penyelamatan tersebut tetap berjalan tanpa menggu-

nakan cara-cara kekerasan. "Kami tetap berusaha untuk menemukan, tentunya tapi tidak berdampak negatif atau berdampak korban di pihak masyarakat," katanya.

Meskipun demikian, Yudo mengungkap usahanya menembus ke wilayah tempat KKB yang menyandera kapten Philips untuk melakukan upaya dialog. "Tidak gampang melakukan dialog dengan KKB, sehingga tidak ada target waktu kapan terselesaikan, tetapi kami selalu berupaya agar langkah persuasif tersebut dapat menemui titik terangnya. Kesepakatan dua pihak ini kan juga nggak gampang," bebernya.

Yudo pun tetap melakukan komunikasi dengan Penjabat Bupati Nduga, beserta tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat agar upaya penyelamatan warga negara Selandia Baru tersebut tidak menimbulkan kerugian atau korban jiwa, terutama bagi masyarakat yang ada di distrik sekitar lokasi penyanderaan.

(Ant/Has)-f

## PRIA ASAL PANDEGLANG BANTEN

# Hasan Tata Abas Asisten Imam Masjid Nabawi

**HASAN** Tata Abas, pria asal Banten ini merupakan orang Indonesia yang terpilih menjadi pelayan atau asisten salah satu Imam Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Tak banyak orang yang mengenal Hasan Tata Abas. Sebab, Hasan memang jarang bersentuhan dengan khalayak dan lebih banyak menghabiskan waktunya di Maarots Kadimiyah Masjid Nabawi.

Sehari-harinya, Hasan membantu dan melayani Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad al-Qasim, satu dari tujuh Imam Masjid Nabawi mulai dari menyiapkan ruangan, menyediakan makan minum dan sebagainya. Tak hanya itu, Hasan juga kerap mene-



KR-Istimewa

**Hasan Tata Abas (berpeci putih) bersama Imam Masjid Nabawi.**

## KEPALA BP2MI:

### Kapolri Berkomitmen Kuat Tangani TPPO

**JAKARTA (KR)** - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebut, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memiliki komitmen kuat untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan membentuk Satgas TPPO Polri. "Kapolri memiliki komitmen yang kuat, saya tidak ragu. Sangat kuat," kata Benny dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (7/6).

Benny mengapresiasi langkah Kapolri membentuk Satgas TPPO setelah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk memberantas oknum pelindung atau backing dari pelaku TPPO. Menurutnya, pembentukan Satgas TPPO Polri sebagai bukti komitmen Kapolri dalam mencegah dan menangani TPPO. "Pembentukan Satgas TPPO itu keren," kata Benny.

Benny menilai, pembentukan Satgas TPPO Polri sebagai langkah sigap Kapolri menindaklanjuti perintah Presiden setelah ditunjuk sebagai Ketua Harian Gugus Tugas. "Dan saya semakin yakin dengan tugas yang diemban Pak Kapolri untuk kerja secara kolaboratif," terangnya.

Persoalan TPPO menjadi perhatian serius Pemerintah RI. Presiden memimpin rapat internal kabinet untuk membahas persoalan tersebut dengan kementerian, lembaga terkait. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkum) Mahfud MD usai rapat di Istana Negara, Selasa (30/5) menyampaikan, banyak masalah terkait TPPO, dimana orang dikirim ke luar negeri dipekerjakan menjadi budak dan bahkan dianiaya, bahkan ada yang sampai meninggal dunia dalam perjalanan maupun saat dipekerjakan. (Ant/San)-f